

Kebijakan Isolasionisme Presiden Trump dan Masa Depan Pangkalan Militer AS di Jepang

Anisa L. Umoro

International and Advance Japanese Studies, Graduate School of Humanities and Social Sciences
University of Tsukuba
1-1-1 Tennodai Tsukuba Ibaraki 305-8571, Jepang
umoro.anisa@gmail.com
Diserahkan: 15 Maret 2018; diterima: 16 Juli 2018

Abstract

The election of Donald Trump with his America First slogan has sent a signal that the new President is less interested in maintaining the position held by the United States as the leader on the international stage. This phenomenon raises questions about the United States' commitment to its military presence outside its territory. By presenting the case of US military bases in Japan, this paper attempts to project the fate of these bases under the Trump presidency. At first glance, the President's inward-looking policy may seemingly trigger the future withdrawal of US troops from Japan. However, this article shall present an argument to the contrary: US military bases in Japan will survive the Trump presidency. To prove this argument; first, this article analyzes the reasoning behind the decision of a sending country to withdraw its military forces. Secondly, this article discusses what factors may underlie the decision of a host country to end military cooperation with the sending country. Finally, this paper analyzes the existence of mutual strategic factors. Although seven of these eight factors are supporting the continued presence of US military bases, one factor, namely President Trump's isolationist policy, shows that it may lead to the contrary. Nevertheless, this isolationist policy factor alone is not enough to end the existence of US military bases in Japan.

Keywords: Trump, military base, Japan, America First, survival.

Abstrak

Kemenangan Donald Trump dengan slogan *America First* mengisyaratkan Presiden baru tersebut kurang tertarik mempertahankan posisi AS sebagai pemimpin di panggung internasional. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen AS terhadap keberadaan militer di luar wilayahnya. Dengan menggunakan kasus pangkalan militer AS di Jepang, tulisan ini mencoba memproyeksikan nasib pangkalan tersebut di bawah kepresidenan Trump. Sekilas, kebijakan *inward looking* sang Presiden bisa memicu penarikan pasukan AS dari Jepang. Namun artikel ini berargumen sebaliknya. Pangkalan militer tersebut akan bertahan di era Trump. Untuk membuktikan hal tersebut, pertamanya, artikel ini menganalisis apa yang membuat negara pengirim menarik pasukan militernya. Kedua, artikel ini mendiskusikan faktor apa yang bisa melatar-belakangi negara penerima untuk mengakhiri kerjasama militer dengan negara pengirim. Terakhir, tulisan ini menganalisis mengenai keberadaan faktor strategis bersama. Walaupun tujuh dari delapan faktor tersebut mendukung arah bertahannya pangkalan militer AS, satu faktor yaitu kebijakan isolasionis Presiden Trump, menunjukkan ke arah sebaliknya. Meskipun demikian, faktor kebijakan isolasionis saja tidak cukup untuk mengakhiri keberadaan pangkalan militer AS di Jepang.

Kata kunci: Trump, pangkalan militer, Jepang, *America First*, bertahan.

PENDAHULUAN

Kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2016 mengejutkan banyak pihak. Trump, seorang jutawan dari New York dan mantan bintang layar kaca, mengalahkan Hillary Clinton dengan margin *electoral colleges* yang cukup signifikan. Sejak

mengumumkan niatnya mencalonkan diri sebagai kandidat presiden AS, pemilik bisnis *real estate* tersebut merupakan tokoh penuh kontroversi. Trump menarik perhatian dunia dengan proposal kebijakannya yang dinilai sarat dengan kebencian dan rasisme, termasuk di antaranya

melarang umat muslim masuk ke AS dan membangun tembok perbatasan dengan Meksiko. Lebih lanjut, mantan pemandu acara *The Apprentice* ini mencitrakan AS sebagai negara yang ekonominya dicurangi serta dipaksa menerima imigran kriminal dari negara lain. Menurut Trump, hal ini dikarenakan para politisi di Washington lebih menaruh kepentingan global di atas kepentingan Amerika (Curran, 2018).

Sikap antagonistik Trump terhadap negara lain tidak hanya berhenti di bidang ekonomi dan imigrasi. Trump percaya bahwa sekutu-sekutu AS memanfaatkan negara adidaya tersebut untuk menyediakan perlindungan murah. Kritik ini utamanya diarahkan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO (*the North Atlantic Treaty Organization*), organisasi yang dianggapnya sudah ketinggalan jaman. Dalam kritiknya terhadap organisasi yang mengutamakan pertahanan bersama (*collective defense*) tersebut, Trump mengecam para anggotanya yang menggantungkan diri pada AS untuk pertahanan tanpa kontribusi setimpal (CNN, 2016a). Kondisi ini menurut Trump, sangat merugikan AS.

Tidak hanya di Atlantik, sekutu AS di Pasifik seperti Jepang dan Korea Selatan juga tidak luput dari teguran. Jepang utamanya, mendapat kritikan dari calon presiden dari Partai Republik tersebut. Trump menganggap kerja sama militer AS dan Jepang berat sebelah. Menurutnya, Jepang tidak membayar pertahanan militer yang diberikan dan justru membebarkannya ke AS. Lebih lanjut, Trump menyarankan bahwa sudah tiba waktunya bagi Jepang untuk mandiri dalam hal militer dan tidak keberatan apabila Jepang memutuskan membangun sistem senjata nuklir (CNN, 2016b). Tak ayal, pernyataan ini mengagetkan banyak pihak. Kepemilikan senjata nuklir oleh Jepang akan memancing negara-negara tetangga untuk membangun kapasitas nuklirnya yang kemudian berimbas pada perluasan senjata nuklir di kawasan Asia Timur.

Kecaman terhadap sekutu-sekutu terdekat AS tersebut bersinergi dengan slogan yang diusung Trump yang bertajuk *America First*. Esensi dari slogan tersebut adalah penekanan terhadap nasionalisme dan patriotisme Amerika, serta janji mengutamakan AS di atas kepentingan negara lain, sekalipun negara tersebut adalah sekutu AS. Trump menganggap bahwa selama ini AS terlalu sibuk

membantu negara lain dan kurang peduli pada nasib warga Amerika sendiri. Janji mengutamakan kepentingan Amerika dan sikap tegas terhadap siapapun yang mencoba mengambil keuntungan dari AS, tampaknya berhasil merebut hati para pemilih dan mengantar Trump sebagai president ke-45 menggantikan Barack Obama.

Kemenangan Trump dianggap sebagai babak baru kebijakan luar negeri AS. Di bawah pemerintahan Trump, AS bermaksud mengurangi keterlibatannya di dunia internasional (Yuliantoro, Prabandari & Agussalim, 2017). Menarik untuk dikaji, bagaimana sekutu-sekutu AS menanggapi kebijakan Amerika di bawah Presiden Trump. Dengan meningkatnya isu-isu *inward looking* di bawah kepemimpinannya, beberapa pihak mengkhawatirkan nasib kerja sama militer Jepang dan AS. Sekilas, kurangnya perhatian dari pemerintahan Trump terhadap isu global dianggap sebagai sinyal berakhirnya era kepemimpinan AS di panggung internasional. Namun demikian, tulisan ini bermaksud mengulas lebih lanjut bagaimana arah kerja sama militer AS dengan salah satu sekutu terdekatnya di Pasifik yaitu Jepang.

Pendekatan transaksionis ala Trump dikhawatirkan mencederai hubungan AS dan Jepang. Dalam salah satu wawancara, Trump ingin Jepang membayar sepenuhnya perlindungan militer yang disediakan AS. Trump juga menyarankan Jepang untuk memperkuat diri dengan senjata nuklir, terutama ketika dihadapkan dengan ancaman dari Korea Utara (CNN, 2016b). Wacana tersebut ditengarai bisa menggiring Negara Sakura tersebut ke arah normalisasi dan meninggalkan ideologi pasifis yang dianut sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ketidakpuasan Trump terhadap bagaimana aliansi militer kedua negara dibangun, memunculkan beberapa pertanyaan yang akan di bahas dalam artikel ini. Pertama, faktor-faktor apa yang berpengaruh pada keputusan ditutup atau diteruskannya sebuah pangkalan militer? Kedua, bagaimana nasib pangkalan militer AS di Jepang kedepannya di bawah Presiden Trump? Dengan menjawab kedua pertanyaan tersebut, artikel ini bermaksud memproyeksikan arah keberlangsungan kerja sama militer AS dan Jepang di era Trump.

KERANGKA PEMIKIRAN

Memahami aliansi AS-Jepang, artikel ini menarik kerangka pemikiran dari *alliance theory* sebagai pijakan pertama. Aliansi didefinisikan sebagai kerja sama keamanan antara dua negara atau lebih yang diatur di bawah perjanjian kerja sama formal maupun informal (Meeks, 2010). Menurut Meeks, pemahaman aliansi yang berangkat dari realisme mempertimbangkan kekuatan (*power*) dan ancaman (*threat*) sebagai dasar dibentuknya aliansi militer antarnegara, termasuk bagaimana sebuah negara merespon adanya ancaman bersama (*mutual threat*). Lebih lanjut, Meeks mengutarakan bahwa dalam kerangka realisme, setidaknya ada tiga hipotesis mengenai mengapa negara membentuk aliansi. Pertama, untuk menyeimbangkan kekuatan atau *balance of power*. Kedua adalah kerangka *balance of threat* yang dikemukakan oleh Walt (1985). Terakhir adalah kerangka *balance of interest* dari Schweller. Ancaman meluasnya pengaruh komunisme Uni Soviet merupakan salah satu motif AS membangun aliansi dengan Jepang. Sedangkan bagi Jepang, negara adidaya tersebut merupakan partner kerja sama militer yang ideal, terutama dalam menghadapi rezim Kim dari Korea Utara (Ota, 2006). Penempatan pasukan dan dibangunnya pangkalan militer AS di Jepang bisa dikatakan sebagai salah satu produk dari terbentuknya aliansi pertahanan. Walaupun Uni Soviet telah bubar, ancaman dari Korea Utara masih dirasakan hingga saat ini. Sebagaimana disampaikan oleh Stephen Walt, aliansi militer merupakan sebuah respon terhadap ancaman (1985). Aliansi juga menekankan elemen *burden sharing* di mana negara yang tergabung dalam aliansi tersebut bertindak saling membantu ketika sekutunya diserang oleh pihak lain (Synder, 1990).

Teori aliansi tersebut di atas lebih menjurus ke kerja sama militer secara umum dan tidak spesifik mengenai basis militer. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana arah keberlangsungan basis militer AS di Jepang, penulis menggunakan kerangka dari Ohtomo (2012) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penutupan sebuah pangkalan militer. Dalam artikelnya, Ohtomo menitikberatkan pemahaman terhadap pembukaan dan penutupan pangkalan militer secara umum dan tidak hanya fokus pada pangkalan militer AS di Jepang. Tabel 1 memberikan ilustrasi bagaimana sebuah pangkalan militer

bermula, berakhir ataupun bertahan.

Pertama-tama Ohtomo menguraikan bagaimana basis militer bermula dan faktor apa saja yang mendasari negara pengirim dalam membangun pangkalan militer di negara lain. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain kepentingan strategis dan kebijakan expansionis AS. AS tercatat memiliki tak kurang dari 800 basis militer di seluruh dunia (Vox, 2015). AS paska Perang Dunia Kedua berkembang menjadi kekuatan *super power* dengan hanya Uni Soviet yang bisa menandingi. Banyaknya pangkalan militer AS yang tersebar di seluruh penjuru dunia memainkan peranan penting dalam menjaga posisi AS sebagai kekuatan yang disegani.

Tabel 1. Faktor-faktor domestik dan international yang memengaruhi keberadaan basis militer.

How Bases Begin	End	Endure
International Factors		
(US) Strategic Interest	(US) Change in the Strategic Interest	(US) Hedge against Future Uncertainties and Potential threat
(US&Host) Common strategic interest [Process of base establishment]	Declining power of sending nations	Sphere of influence/backyard
Outright conquest	(US&Host) Disappearance of common strategic interest	
Defeat and Occupy		
Hand Down		
Remove original inhabitants		
Payment		
Domestic Factors		
(US) Expansionist Policy	(US) Isolationist policy	(Host) Low cost of Presence
(Host) Pro-US (or sending nation)	(Host) Anti-US (or sending nation) regime shift/revolution	
Regime shift	Nationalism	
Other Factors		
(US) Technological Advancement	(US) further technological advancement	

Sumber: Ohtomo (2012:19)

Negara penerima juga memiliki pertimbangan sendiri ketika memutuskan memfasilitasi keberadaan militer AS di wilayahnya, sebagai contoh adanya kepentingan strategis

yang sejajar dengan AS. Jepang misalnya, bergantung pada payung militer AS untuk menghalau ancaman dari negara lain. Tak bisa dipungkiri, sejak Jepang membuang hak berperangnya, kerja sama dengan AS menjadi kunci dari strategi pertahanan Jepang.

Pada bagian kedua, Ohtomo menjelaskan mengapa beberapa pangkalan militer bertahan dan mengapa sebagian lagi tidak. Beberapa faktor yang melatarbelakangi penutupan pangkalan militer antara lain, berubahnya kepentingan strategis AS di wilayah tersebut, menurunnya kekuatan AS, kebijakan isolasionis, dan hilangnya kepentingan strategis bersama. Adapun faktor dari negara penerima meliputi munculnya rezim anti AS dan bangkitnya nasionalisme. Di lain pihak, keberadaan pangkalan militer akan terus berlangsung apabila AS menghadapi kemungkinan ancaman di masa yang akan datang. Selain itu, faktor biaya juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi negara penerima. Jika negara penerima beranggapan bahwa pangkalan tersebut tidak memakan biaya yang terlalu besar, maka besar kemungkinan keberadaannya akan terus diperpanjang.

Dengan menganalisis faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberlangsungan basis militer AS di Jepang, penulis bermaksud memproyeksikan nasib keberadaan pangkalan militer tersebut di era Trump. Analisis dalam artikel ini difokuskan pada faktor yang berpotensi mendorong penutupan pangkalan militer AS di Jepang dan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peranannya di bawah kepemimpinan Presiden Trump. Analisis dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, analisis ditujukan pada AS selaku negara pengirim. Dalam hal ini, penulis memberikan perhatian khusus pada kebijakan Trump yang berkaitan dengan isu kerja sama militer dengan Jepang. Pada bagian kedua, analisis bergeser ke Jepang, selaku negara penerima. Dalam tahap ini, tulisan ini menitikberatkan bagaimana arah kebijakan AS di bawah Trump direspon oleh pengambil kebijakan di Tokyo. Terakhir, artikel ini memaparkan kepentingan bersama AS dan Jepang sebagai landasan dilanjutkannya hubungan kerja sama kedua negara.

ANALISIS

Jepang pasca Perang Dunia Kedua tidak bisa dilepaskan

dari pengaruh AS. Sebagai konsekuensi pihak yang kalah perang, Jepang menerima pengaturan dari Amerika yang menginginkan Jepang membentuk konstitusi baru. *The Supreme Commander of the Allied Power* yang diketuai oleh Jendral Douglas MacArthur memulai restrukturisasi Jepang menuju proses demokratisasi dan demilitarisasi. Tujuan utama kedua hal tersebut adalah mencegah munculnya bibit agresi di masa mendatang. Hasilnya, Jepang berubah total dari negara agresor menjadi negara pasifis. Komitmen ini tercantum dalam Pembukaan Konstitusi Jepang, Artikel 9 dan Artikel 66. Ketiga elemen dari konstitusi baru ini menekankan komitmen terhadap perdamaian dan memberangus peran militer di dunia perpolitikan Jepang. Artikel 9 mungkin merupakan artikel yang paling sering dirujuk ketika membahas penolakan Jepang terhadap kepemilikan angkatan militer dan hak berperang. Pangaturan dalam Artikel 66 tidak kalah penting dalam menegaskan sikap pasifis Jepang. Artikel tersebut melarang anggota militer untuk menjabat sebagai anggota kabinet dan Perdana Menteri (Hook *et al.*, 2001). Di lain pihak, untuk melindungi Jepang dari kemungkinan serangan luar, AS menyediakan payung militer. Atas dasar tersebut, pemerintah AS membangun pangkalan militer di beberapa wilayah Jepang, sebut saja di Yokosuka dan Okinawa.

Awalnya, Jepang merupakan sekutu penting untuk membendung menyebarnya pengaruh komunis di Asia. Pasca runtuhnya Uni Soviet, alih-alih menurun, posisi Jepang justru semakin krusial dalam peta strategis AS. Sebagai contoh, Jepang memainkan peranan penting dalam menyokong AS melawan terorisme pasca serangan 11 September. Oleh karena itu, Tanaka (2016) memandang retorik Trump yang menganggap Jepang hanya menumpang perlindungan dari AS tanpa timbal balik, merupakan pandangan yang salah. Tanaka berpendapat bahwa keberadaan pangkalan AS di Jepang menyokong strategi kepentingan AS di panggung internasional. Lebih lanjut, Tanaka mencontohkan bagaimana pangkalan AS di Jepang menjadi kunci dalam menyediakan suplai logistik dalam menjalankan kebijakan *war against terrorism*.

Pada bagian analisis di bawah, artikel ini memaparkan faktor-faktor yang memicu penutupan atau bertahannya sebuah pangkalan militer dan bagaimana pemerintahan Trump memandang hal tersebut. Tulisan ini mengulas

delapan komponen yang dibagi menjadi tiga subbagian, yaitu faktor negara pengirim, faktor negara penerima dan faktor bersama.

FAKTOR NEGARA PENGIRIM: AMERIKA

Perubahan Kepentingan Strategis Amerika (*Change in the US Strategic Interest*)

Faktor pertama yang memengaruhi penutupan basis militer adalah perubahan kepentingan strategis dari AS selaku negara pengirim. Namun demikian, artikel ini berargumen bahwa kepentingan strategis AS di Asia Timur tidak mengalami perubahan yang berarti selama tahun pertama kepresidenan Trump. Penulis menekankan dua alasan utama yang mendasari argumen ini. Pertama, ketidakmampuan Trump mengubah arah strategi AS. Kedua, memanasnya situasi di Asia Timur sepanjang 2017. Artikel ini berpendapat bahwa kedua hal tersebut justru mengukuhkan relevansi keberadaan pangkalan militer AS di Jepang.

Dombrowksi dan Reich (2017) mempertanyakan apakah Trump memilih *grand strategy*. Terpilihnya Trump dengan semboyan *America First* membuatnya berbeda dengan presiden-presiden AS sebelumnya. Alih-alih berambisi memperkuat pengaruh AS di internasional, Trump justru kurang tertarik dengan hal tersebut. Kedua penulis tersebut juga berargumen bahwa kebijakan isolasionis ala Trump kurang sukses di tahun pertama kepemimpinannya. Alasan utama dari kegagalan ini adalah kuatnya mesin strategi yang telah dibangun AS selama bertahun-tahun. Selain itu, kondisi operasional di lapangan juga menghalangi Trump untuk mengaplikasikan kebijakan isolasionismenya secara menyeluruh. Motor kebijakan AS di bawah Trump, justru mengikuti arah yang diambil oleh para pendahulunya (Dombrowksi & Reich, 2017). Untuk membuktikan argumennya, Dombrowksi dan Reich mencontohkan beberapa kasus, salah satunya kebijakan AS dalam menghadapi Korea Utara. Mereka juga mencatat bahwa dalam menghadapi Korea Utara, Trump memilih langkah bekerja sama dengan Korea Selatan dan Jepang serta memberlakukan sanksi ekonomi ke Korea Utara. AS juga turut bekerja sama dengan Cina untuk menekan rezim Kim. Langkah ini dinilai tidak jauh berbeda dengan kebijakan presiden-presiden AS terdahulu,

termasuk Bill Clinton dan Barack Obama dari Partai Demokrat (Dombrowksi & Reich, 2017).

Penilaian Dombrowksi dan Reich mengenai ketiadaan *grand strategy* baru dalam pemerintahan Trump sejalan dengan argumen dari Sa (2017) dan Cassidy (2017) yang berpendapat bahwa doktrin Trump hanyalah sebuah doktrin semu. Kedua penulis tersebut percaya bahwa doktrin Trump, bukanlah sebuah cetak biru atau tuntunan kebijakan luar negeri, namun hanya sikap politik yang tidak matang dan penuh inkonsistensi.

Memanasnya ancaman nuklir dari Korea Utara juga merupakan alasan mengapa tahun pertama pemerintahan Trump bukanlah saat yang tepat untuk mengubah kepentingan strategi AS secara dratis. Penutupan pangkalan militer AS di Jepang membahayakan posisi negara matahari terbit tersebut. Posisi Jepang yang bisa dijangkau dengan peluru kendali jarak menengah serta sejarah kelam kedua negara, menjadikan Jepang sebagai sasaran serangan nuklir Korea Utara. Selain itu kedekatan Jepang dengan AS juga dianggap Pyongyang sebagai ancaman terhadap rezimnya.

Di awal masa kepresidenannya, Trump sempat menyampaikan ujaran bernada positif mengenai Kim Jong Un (NBCnews, 2017a). Namun demikian, pandangan positif Trump terhadap pemimpin Korea Utara tersebut berubah seiring berjalannya waktu. Selama tahun 2017, Korea Utara telah beberapa kali menembakkan misilnya ke teritori Jepang. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa versi terbaru peluru kendali Korea Utara mampu mencapai Washington dan seluruh teritori AS (The Washington Post, 2017a). Perkembangan mengkhawatirkan ini tentu menjadi perhatian banyak pihak. Menlu AS, Rex Tillerson misalnya, berkomitmen mengajak Korea Utara ke meja perundingan. Rencana Menlu Tillerson ini sayangnya tidak mendapat persetujuan dari Presiden Trump. Sang Presiden berpendapat bahwa jalur diplomasi bukanlah jalur yang tepat untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara. Hal ini membingungkan banyak pihak. Menlu seharusnya merupakan perpanjangan tangan dari Presiden. Kritik dari Presiden Trump terhadap pejabatnya sendiri dianggap mengampustasi kepercayaan negara lain terhadap Menlu Tillerson. Bagaimana mungkin negara lain berdiplomasi dengan sang Menlu, jika sudah mengetahui dia tidak mendapatkan dukungan dari Presiden. Kondisi

ini diperkeruh dengan sikap Presiden Trump yang melontarkan cuitan-cuitan bernada provokatif melalui akun twitter nya. Lebih jauh, Presiden yang terkenal dengan slogan *Make America Great Again* tersebut mengancam akan membombardir Korea Utara dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun demikian, terlepas dari sikap meledak-ledak Presiden Trump, pemerintahannya tidak menawarkan langkah konkret yang berbeda dengan para pendahulunya dalam menghadapi Korea Utara.

Selain ancaman dari Korea Utara, keberadaan Cina juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah AS. Apabila AS memutuskan hengkang dari Asia Timur, tak diragukan Cina akan memperkuat posisinya di kawasan tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan memperuncing persaingan-persaingan antarnegara di Asia Timur. Namun demikian, di luar retorik keras yang ditunjukkan Presiden Trump, secara keseluruhan tidak ada perubahan besar dalam strategi AS di kawasan tersebut.

Menurunnya kekuatan AS (*Declining power*)

Faktor kedua yang bisa mengakhiri keberadaan sebuah pangkalan militer adalah menurunnya kekuatan negara pengirim. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika praktis menjadi satu-satunya negara adidaya. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir Cina berupaya menyusul AS. Tidak bisa dipungkiri, Amerika masih merupakan kekuatan terbesar baik dari segi militer maupun finansial. Hingga tahun 2017, AS masih merupakan pemegang GDP terbesar dunia. Selain berkuasa secara finansial, kekuatan militer AS juga belum tertandingi.

Di bidang militer, alih-alih mengurangi, Trump justru ingin melipat gandakan kekuatan militer. Prioritas ini ditunjukkan Presiden Trump dengan memotong anggaran non-militer dan mengalokasikan dana tambahan ke bidang pertahanan. Pengajuan proposal anggaran militer oleh Presiden Trump pada tahun 2017 mencapai 639 miliar dollar, lebih besar dari anggaran sebelumnya di bawah Obama yang hanya sekitar 587 miliar dollar (*the Guardian*, 2017). Pada akhirnya, senat justru meloloskan 700 miliar dollar, lebih besar dari yang diajukan presiden (*The New York Times*, 2017). Walaupun Trump seringkali menyuarakan pendapat yang berbeda dengan partai

politiknya, dalam hal pertahanan, Trump tampaknya ingin meneruskan tradisi *hawkish* Partai Republik. Selain itu, dalam salah satu pertemuan di Gedung Putih, Trump dikabarkan berminat untuk menambah kekuatan nuklir hingga sepuluh kali lipat dari kondisi yang ada saat ini (*NBCnews*, 2017b). Oleh karena itu, tulisan ini memandang bahwa keinginan Trump untuk mengurangi keterlibatannya di dunia internasional sebagai indikasi menurunnya kekuatan AS. Bagaimanapun, dengan potret saat ini AS masih merupakan kekuatan militer (dan juga ekonomi) yang patut disegani.

Pengaruh non-militer AS juga dirasakan dunia dalam bentuk ekspor nilai, misalnya, nilai kebebasan dan demokrasi (Moon, 2008). Walaupun sejak bubarnya Uni Soviet, AS tidak memiliki rival yang sepadan, dengan bangkitnya Cina, publik mulai bertanya-tanya apakah Negeri Tirai Bambu itu akan tampil sebagai kekuatan adidaya baru menggantikan AS. Hanya saja, di luar militer dan ekonomi, Cina belum memiliki kerangka nilai dalam jangka panjang sebagaimana AS. Oleh karena itu, kemampuan Cina untuk sepenuhnya menggeser AS masih perlu dipertanyakan.

Kebijakan Isolasionis (*Isolationist Policy*)

Retorik kampanye Trump padat dengan nuansa isolasionisme. Nuansa isolasionis ini kemudian temakutub dalam kebijakan luar negerinya (Elis *et al.* dalam Yuliantoro, Prabandari & Agussalim, 2017; Curren, 2018). Ketidaktertarikan sang Presiden untuk terus menjaga hegemoni Amerika di mata dunia ditunjukkan dengan setidaknya dua langkah besar. Pertama adalah arah kebijakannya yang kental dengan nuansa *inward looking*. Kedua, keengganan Presiden Trump untuk mengisi posisi kunci di Departement Luar Negeri AS (*State Department*).

Kebijakan AS era Trump cenderung mengarah pada *inward looking*. Kecenderungan kebijakan isolasionisme Trump sudah kentara sejak masa kampanye, baik di bidang ekonomi maupun pertahanan. Salah satu langkah awal Trump sebagai presiden adalah meninggalkan TPP (*Trans Pacific Partnership*) yang dipelopori oleh presiden sebelumnya. Selain itu, Trump juga memutuskan menarik Amerika dari *Paris Agreement*. Di bidang pertahanan, Presiden Trump menolak meyakinkan anggota NATO

terkait komitmen AS terhadap Artikel 5 mengenai pertahanan bersama (*collective defense*) (ForeignPolicy, 2017). Hal ini tidak luput dari perhatian Jepang. Mengingat teguran keras Trump terhadap Jepang di masa kampanye, sikap Trump terhadap NATO tentu mengkhawatirkan Jepang.

Faktor kedua adalah peniadaan Deplu AS di bawah Trump sebagai ujung tombak kebijakan luar negeri. Kegagalan, atau mungkin lebih tepatnya keengganan Presiden Trump dan Menlu Tillerson¹ untuk mengisi posisi kunci departemen tersebut menimbulkan kekusaran berbagai pihak terutama terkait peran Departemen Luar Negeri sebagai gerbang utama kebijakan luar negeri AS. Hal tersebut mencerminkan sedikitnya perhatian yang diberikan pemerintah Trump terhadap kebijakan luar negeri. Bagaimanapun, Departemen Luar Negeri adalah ujung tombak dari kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan ditiadaknya Departemen Luar Negeri sebagai mesin utama diplomasi AS, kekuatan AS untuk menjaga pengaruhnya di panggung internasional menjadi berkurang. Sikap pemerintahan Trump yang kurang menaruh perhatian pada mesin diplomasinya sejajar dengan misinya yang ingin memfokuskan diri pada kondisi dalam negeri.

Presiden Trump dinilai sengaja membiarkan posisi tersebut tak terisi. CNN mencatat, per Desember 2017, Presiden Trump masih belum mengisi posisi Duta Besar di negara-negara kunci semacam Arab Saudi, Iraq dan Yemen. Selain itu, Presiden Trump juga dinilai lambat dalam mengajukan calon yang membutuhkan konfirmasi senat (CNN, 2017). Hal ini tidak lazim mengingat Partai Republik memegang kontrol baik di Dewan Perwakilan (*House of Representative*) maupun Senat. Bahkan, duta besar untuk Korea Selatan dibiarkan lama kosong. Hingga dimulainya olimpiade musim dingin di PyeongChang pada Februari 2018, Presiden Trump masih belum menunjuk Duta Besar AS untuk Korsel (The Diplomat, 2018). Alih-alih, sang Presiden mengirim putrinya sebagai wakil dari AS untuk berdialog dengan Presiden Moon mengenai Korea Utara. Dubes untuk Korea Selatan mutlak diperlukan mengingat kondisi Semenanjung Korea yang terus bergolak. Meskipun demikian, pemerintahan Trump tampaknya tidak berpendapat bahwa penunjukan Dubes untuk Korsel adalah sesuatu yang mendesak. Kaitannya

dengan isu pangkalan militer, keberadaan duta besar diperlukan untuk memastikan lancarnya kerja sama kedua negara. Duta Besar AS untuk Jepang, misalnya, acapkali ditugasi menjembatani isu sensitif seperti keberadaan pangkalan militer AS di Okinawa (The Washington Post, 2017b). Sebagaimana diketahui, keberadaan pangkalan bagian selatan Jepang tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Tak hanya gagal mengisi posisi kunci, anggaran Departemen Luar Negeri juga dipotong. Trump bersama penasihatnya, Steve Bannon, memotong anggaran untuk Deplu untuk tahun 2017. Pemerintah Trump kembali memotong dana untuk Deplu untuk tahun 2018 sebanyak 28% dari dana tahun sebelumnya (Office of Management and Budget, 2018).

Kemajuan Teknologi (*Further technological advance*)

Ohtomo berpendapat bahwa kemajuan teknologi bisa menjadi penyebab berakhirnya keberadaan basis militer di sebuah negara. Sebagai misalnya, apabila kelak AS berhasil menemukan teknologi untuk membangun pangkalan militer di laut lepas, maka AS tidak perlu tergantung pada negara penerima untuk menampung pasukan dan artileri militernya. Dengan banyaknya kontroversi mengenai pasukan Amerika di Jepang, pembangunan pangkalan militer di laut lepas dianggap solusi untuk menghindari konflik dengan penduduk lokal. Namun dikarenakan faktor biaya dan teknologi, pembangunan basis militer di laut lepas masih dalam tahap wacana.

Selain itu, pesawat militer canggih bisa saja terbang dari wilayah AS langsung ke Afganistan atau Iraq tanpa perlu berhenti untuk isi ulang bahan bakar. Hal ini mengurangi insentif AS untuk memiliki pangkalan militer di luar wilayahnya, karena semua bisa diterbangkan langsung dari markasnya di Amerika. Meskipun demikian, Ohtomo sendiri berpendapat kemajuan teknologi tidak serta merta mengakhiri kerja sama militer. Oleh karena itu, artikel ini berpendapat bahwa faktor teknologi kurang berpengaruh dalam menentukan nasib basis militer di Jepang di bawah Presiden Trump.

FAKTOR NEGARA PENERIMA: JEPANG

Munculnya Rezim Anti AS (*Anti US Regime Shift*)

Faktor menentukan yang bisa mengakhiri kerja sama

militer adalah munculnya rezim anti AS di Jepang. Sejauh ini, belum ada rezim yang benar-benar berniat mengakhiri kerja sama militer yang berlangsung lebih dari tujuh puluh tahun tersebut. *Liberal Democratic Party* (LDP), partai politik yang menguasai panggung politik Jepang selama lebih dari lima dekade mengisyaratkan keinginannya untuk meneruskan *status quo*. Kemenangan mengejutkan *the Democratic Party of Japan* (DPJ) pada pemilu majelis rendah 2009 membuat beberapa pengamat mempertanyakan nasib aliansi militer AS-Jepang. Terlebih ketika para politisi dari DPJ menginginkan pengurangan alokasi dana untuk basis militer (Arase, 2009). Terlepas dari hal tersebut, perubahan mendasar terkait basis militer AS di Jepang tidak terjadi di bawah kepemimpinan DPJ. Pada pemilu selanjutnya di tahun 2012, LDP kembali ke tampuk kekuasaan. Dengan kembalinya LDP, bisa diperkirakan bahwa hubungan AS dan Jepang akan kembali sebagaimana sebelum 2009. Pada pemilu berikutnya di tahun 2014 dan 2017, LDP berhasil mempertahankan posisinya di tampuk kekuasaan. Kemenangan itu juga mengukuhkan kembali posisi Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang.

Abe, merupakan pemimpin dunia pertama yang bertemu Presiden terpilih Trump di New York tak lama setelah pemilu. Setelah Trump dilantik sebagai Presiden, wacana ujaran keras terhadap Jepang praktis tenggelam. Pemerintah AS, baik melalui Presiden Trump maupun Wakil Presiden Pence menekankan pentingnya kerja sama kedua negara. Lebih lanjut, dalam kunjungan Presiden Trump ke Jepang di tahun 2017, kedua pemimpin bertekad semakin memperkuat aliansi kedua negara (*make the alliance even greater*) (ABCNews, 2017). Afirmasi ini memastikan bahwa pemerintah Jepang masih ingin meneruskan aliansi dengan AS, termasuk di bidang militer. Berbanding terbalik dengan kritik kerasnya terhadap Jepang, melunaknya sikap Trump tersebut dianggap sebagai kemenangan diplomasi pemerintahan Abe.

Tak bisa dipungkiri, keberadaan pangkalan AS di Jepang acapkali menimbulkan kontroversi di masyarakat. Publik Jepang, terutama warga Okinawa telah beberapa kali menyampaikan keberatannya mengenai keberadaan pangkalan militer tersebut. Okinawa, sebuah pulau di bagian selatan Jepang, menampung tak kurang dari 60 persen dari total pasukan AS di Jepang. Selain masalah

polusi suara dan efek negatifnya terhadap lingkungan hidup, keberatan warga utamanya terkait dengan sikap beberapa personel militer AS yang terlibat tindak kriminal. Kasus yang paling terkenal adalah pemerkosaan gadis sekolah menengah oleh tiga anggota pasukan AS. Selain itu, ada pula kasus tabrak lari oleh anggota militer AS (The Guardian, 2016). Kasus terbaru terjadi tahun 2016 yaitu peristiwa pembunuhan terhadap warga lokal yang dilakukan oleh anggota angkatan laut AS (Time, 2016). Peristiwa-peristiwa tersebut kembali memancing kemarahan warga yang sudah lama menginginkan pasukan AS angkat kaki dari wilayahnya. Meskipun demikian, pemerintah pusat di Tokyo beranggapan bahwa pangkalan militer tersebut masih diperlukan untuk menjaga keamanan Jepang (Ohtomo, 2014). Walaupun protes dan demonstrasi massa acapkali muncul untuk menolak keberadaan pasukan AS, hal ini tidak serta merta memunculkan bibit anti AS.

Nasionalisme (*Nationalism*)

Bangkitnya nasionalisme di negara penerima bisa menjadi pemicu berakhirnya aliansi pertahanan. Dalam konteks kerja sama militer AS dan Jepang, nasionalisme seringkali diasosiasikan dengan normalisasi dan kembalinya angkatan militer Jepang (Berger, 2014). Apabila Jepang akhirnya memilih nasionalisme dan menormalisasi angkatan bersejatanya, bukan tidak mungkin jika Jepang juga menginginkan AS untuk angkat kaki dari wilayahnya. Memang, isu nasionalisme kembali menjadi perdebatan publik di Jepang belakangan ini. Perdana Menteri Abe misalnya ditengarai memiliki hubungan dekat dengan sayap kanan Jepang yang pro nasionalisme. Abe, dalam wawancara nya bersama Tepperman (2013) menyampaikan pandangannya terhadap kemungkinan revisi konstitusi pasifis Jepang. PM Abe beranggapan bahwa pengaturan sistem pertahanan Jepang saat ini tidak masuk akal. Politisi dari partai LDP itu mencontohkan kasus di mana Jepang tidak bisa menyerang balik ketika, kapal AS misalnya, ditembak oleh musuh di perairan Jepang. Meskipun demikian, dalam wawancara yang sama, PM Abe juga menyanggah label nasionalis yang disematkan padanya. Selain itu, banyak pihak meragukan apakah Abe layak menyandang sebutan nasionalis (Morris-Suzuki, 2013).

Beberapa pengamat menilai bahwa Abe adalah sosok yang kontradiktif. Di satu pihak, Abe dinilai tokoh nasionalis yang berambisi mengamendemen konstitusi Jepang. Di sisi lain, Abe dinilai sebagai pemimpin pragmatis yang mengutamakan kemajuan ekonomi (Dobson, 2016). Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, Berger (2014) berargumen bahwa wacana bangkitnya nasionalisme dan militer Jepang terlalu dilebih-lebihkan.

Tak hanya pemerintah Jepang, sikap masyarakat Jepang terkait wacana revisi undang-undang dasar juga bercabang. Setelah menjadi negara damai selama lebih dari 70 tahun, mayoritas publik Jepang masih gamang dengan prospek militerisasi. Opini publik sangat menentukan bagaimana kelanjutan wacana revisi tersebut. Pasalnya, revisi konstitusi tidak hanya memerlukan suara mayoritas dari parlemen tetapi juga publik Jepang.² Walaupun topik mengenai revisi pasal 9 dan normalisasi Jepang mencuat kembali dalam beberapa waktu terakhir, tindakan nyata menuju arah tersebut masih terbatas.

Apabila Trump benar-benar menarik pasukannya dari Jepang, Tokyo dinilai memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memperkuat diri. Jepang misalnya, dinilai mampu untuk menaikkan anggaran belanja militernya lebih dari 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, Jennifer Lind (2017) dalam esainya menyebutkan bahwa Trump tidak sungguh-sungguh ingin mengimplementasikan retorik yang disampaikan ketika kampanye. Lind bahkan mengilustrasikan sikap Trump ini sebagai bualan belaka. Berubahnya sikap Trump terhadap Jepang dianggap sebagai pertanda bertahannya aliansi militer kedua negara.

FAKTOR BERSAMA

Hilangnya kepentingan strategis bersama (*Dissapearance of common strategic interest*)

Kepentingan bersama negara pengirim dan penerima merupakan alasan nyata keberlangsungan sebuah pangkalan militer di suatu negara. Asas kepentingan bersama seringkali merupakan perwujudan dari kepentingan nasional yang bersinergi dengan kepentingan negara sekutu. Di awal masa terbentuknya aliansi militer misalnya, AS menggunakan Jepang untuk membendung pengaruh komunisme di kawasan Asia Pasifik. Jepang, di lain pihak, menghendaki perlindungan militer dari AS. Setelah

bubarnya Uni Soviet, aliansi kedua negara bergeser dari militer ke arah politik. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa aliansi militer tersebut menjadi usang dan tidak diperlukan lagi. Mengingat hubungan negara-negara di kawasan Asia Timur yang problematik, keberadaan pasukan AS di Jepang dirasa masih relevan.

Yang (2014) menegaskan bahwa hubungan kerja sama antara kedua negara mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hubungan asimetris 'tuan dan pelayan,' dengan AS sebagai tuan dan Jepang sebagai pelayan, sebagaimana digambarkan di era pasca Perang Dunia dianggap sudah tidak lagi berlaku (Yang, 2017). Walaupun Jepang mulai menikmati posisi yang sejajar dengan AS, mengakhiri kerja sama militer di AS bukanlah pilihan yang tepat. Shinoda (2011) mencatat bahwa Jepang mendapat banyak manfaat dari perlindungan nuklir yang disediakan AS. Selain itu, kerja sama militer tersebut memungkinkan transfer informasi intelijen, dan teknologi militer terbaru termasuk pengembangan sistem anti peluru kendali. Singkatnya, nilai positif kerja sama tersebut masih mengungguli dampak negatifnya (Shinoda, 2011).

Hubungan kedua negara tidak selalu tanpa masalah. Perbedaan keduanya dalam kebijakan ekonomi misalnya kerap menjadi catatan tersendiri dalam dinamika hubungan AS-Jepang (Tanaka & Takadoro, 2017). Bangkitnya ekonomi Jepang juga dianggap sebagai kembalinya Jepang di ranah internasional. Walaupun Jepang tetap mempertahankan kebijakan pasifisnya, pengaruh Jepang dari segi finansial mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Terkait hubungannya dengan AS, Jepang mulai dilihat sebagai partner yang sejajar. Peristiwa 9/11 menjadi titik tolak evolusi hubungan kedua negara. AS, di bawah Presiden Bush ketika itu, melancarkan kebijakan perang melawan terorisme, di mana Jepang menjadi sekutu terdekat AS di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Yang (2014) juga mencatat bahwa kepentingan strategis bersama AS dan Jepang saat ini meliputi "perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, stabilitas dan kemakmuran, mencegah proliferasi senjata pemusnah massal, pencegahan terorisme dsb" (Joint Statement of US-Japan Security Consultative Committee, 2005, dalam Yang 2014:73-74).

Tabel 2. Rangkuman Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi penarikan pangkalan militer AS di Jepang

No	Faktor-faktor yang memengaruhi penarikan pangkalan militer AS di Jepang	Status dalam satu tahun kepresidenan Trump
FAKTOR DARI NEGARA PENGIRIM (AS)		
1	Perubahan kebijakan strategis AS (<i>Change in the strategic interest</i>)	Tidak terbukti
2	Menurunnya kekuatan AS (<i>Declining power</i>)	Tidak terbukti
3	Kebijakan isolasionis (<i>Isolationist policy</i>)	Terbukti
4	Kemajuan teknologi (<i>Further technological advance</i>)	Tidak terbukti
FAKTOR DARI NEGARA PENERIMA (JEPANG)		
5	Munculnya rezim anti AS (<i>Anti US regime shift</i>)	Tidak terbukti
6	Nasionalisme (<i>Nationalism</i>)	Tidak terbukti
FAKTOR BERSAMA		
7	Hilangnya kepentingan strategis bersama (<i>disappearance of common strategic interest</i>)	Tidak terbukti

Sumber: dirangkum oleh penulis

Table 2 merangkum hasil analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ditutupnya pangkalan militer AS di Jepang. Dari delapan faktor yang dipaparkan, hanya satu faktor yang terbukti yaitu kebijakan isolasionisme. Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, faktor tersebut menunjukkan peningkatan. Akan tetapi, tujuh dari delapan faktor yang dianalisis tidak mendukung ke arah penarikan pasukan AS dari Jepang. Walaupun faktor-faktor tersebut di atas dapat berpengaruh terhadap penutupan pangkalan militer AS di Jepang, artikel ini berpendapat bahwa kedelapan faktor tersebut tidak memiliki bobot yang sama. Sebagai contoh, kemajuan teknologi tidak memiliki bobot yang lebih besar dari munculnya rezim anti AS. Katakanlah dalam waktu dekat AS mampu untuk membangun pangkalan militer di laut lepas, hal ini mungkin tidak akan terwujud apabila Jepang masih menghendaki keberadaan militer AS di wilayahnya. Oleh karena itu, perlu ditilik lebih lanjut faktor mana yang memiliki kadar yang paling tinggi. Dalam hal ini, faktor kepentingan bersama dinilai paling kuat. Selama kedua belah pihak masih menginginkan adanya pangkalan militer

tersebut, maka bisa dipastikan bahwa kerja sama akan terus berlangsung. Terakhir, artikel ini berpendapat bahwa pangkalan militer AS di Jepang akan dipertahankan oleh pemerintahan Trump.

KESIMPULAN

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS ke-45 mengagetkan banyak pihak. Kecenderungan isolasionisme yang diusung Trump ketika kampanye, membuat sekutu AS meragukan komitmen negara Paman Sam di bawah kepemimpinannya. Artikel ini bertujuan menjawab dua pertanyaan terkait nasib pangkalan AS di Jepang di era Trump. Pertama, apakah dengan terpilihnya Presiden Trump, pangkalan militer di Jepang akan ditutup? Kedua, faktor-faktor apa yang melandasi penutupan/keberlanjutan pangkalan militer AS di Jepang?

Artikel ini menganalisis faktor dari negara pengirim yaitu AS, di bawah kepemimpinan Trump. Kemudian, artikel ini mengevaluasi bagaimana sikap Jepang mengenai keberadaan pangkalan militer tersebut di kurun waktu yang sama. Terakhir, artikel ini mengulas faktor bersama (AS dan Jepang). Hasilnya, dari delapan faktor yang dianalisis di dalam tulisan ini, hanya satu faktor terbukti, yaitu kebijakan isolasionisme dari AS. Namun demikian, faktor-faktor lain tidak mendukung ke arah penutupan pangkalan militer. Faktor kepentingan strategis bersama justru meningkat dikarenakan memanasnya ancaman serangan nuklir Korea Utara.

Sekilas doktrin *America First* yang diusung oleh Presiden Trump bisa mengancam keberlangsungan pangkalan militer di Jepang. Meskipun demikian, tulisan ini berpendapat bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah Trump akan melanjutkan kebijakan pendahulunya dengan tidak menutup pangkalan militernya di Jepang. Kemudian, tulisan ini memperidiksi bahwa *status quo* keberadaan militer AS di Jepang akan terus bertahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima terima kasih kepada Profesor Takafumi Ohtomo atas diskusi dalam seminar sehingga menginspirasi penulis untuk menggarap artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada Waticum Sylvie atas saran-saran yang diberikan.

CATATAN BELAKANG

- ¹ Tillerson digantikan oleh mantan Direktur CIA, Mike Pompeo sebagai Menteri Luar Negeri per Maret 2018.
- ² Revisi konstitusi dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah mendapatkan minimal dua pertiga suara dari anggota parlemen. Apabila lolos di parlemen, pemerintah kemudian mengadakan referendum, dengan sistem *simple majority*, untuk meminta persetujuan publik Jepang.

REFERENSI

- ABCNews. (2017). Trump, Abe Bond over Golf and 'Make Alliance Even Greater' Hats. Diakses 9 Januari 2018, dari <http://abcnews.go.com/Politics/trump-golf-tokyo-2020-olympics-abe-world-matsuyama/story?id=50927090>.
- Abe, S. & Tepperman, J. (2013). Japan is Back: a Conversation with Shinzo Abe. *Foreign Affairs*, Vol. 92(4), July/August.
- Arase, D. (2009). Japan in 2009: Historic Election Year. *Asian Survey*, Vol. 50(1).
- BBC News. (2016). US Election 2016: Trump Victory in Maps. Diakses 1 Februari 2018, dari <http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37889032>.
- Berger, T. U. (2014). Abe's Perilous Patriotism: Why Japan New Nationalism Still Create Problems for the Region and the U.S-Japanese Alliance. Diakses 10 Maret 2018, dari https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/141003_Berger_AbePerilousPatriotism_Web_0.pdf.
- Cassidy, J. (2017). There is No Trump Doctrine, Only Contradictions and Bluster. *The New York Post*. <https://www.newyorker.com/news/john-cassidy/there-is-no-trump-doctrine-only-contradictions-and-bluster>, diakses 10 Maret 2018.
- Chanlett-Avery, E. & Rienhart, I. E. (2016). The US-Japan Alliance. *Congressional Research Service*. <https://fas.org/spp/crs/row/RL33740.pdf>, diakses 31 Januari 2018.
- CNN. (2016a). Reality check: Trump on NATO Countries Paying Their Fair Share. Diakses 1 Februari 2018, dari <https://edition.cnn.com/2016/07/27/politics/donald-trump-nato-allies/index.html>.
- _____. (2016b). Trump Flip-Flops on Japan Nukes. Diakses 6 Januari 2018, dari <http://edition.cnn.com/2016/06/02/politics/donald-trump-nuclear-weapons-japan/index.html>.
- _____. (2017). Maps: Trump Continues to Leave Key State Department Empty. Diakses 10 Maret 2018, dari <https://edition.cnn.com/2017/12/07/politics/trump-ambassador-vacancies/index.html>.
- Currant, J. (2018). Americanism not Globalism: President Trump and the American Mission. *Lowy Institute*. https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/Curan_President%20Trump%20and%20the%20American%20Mission_WEB.pdf, diakses 4 Maret 2018.
- Dobson, H. (2016). Is Japan Really Back? "The Abe Doctrine" and Global Governance. *Journal of Contemporary Asia*, Vol.47(2).
- Dombrowski, P. & Reich, S. (2017). Does Donald Trump have A Grand Strategy? *International Affairs*, Vol. 93(5).
- Foreign Policy. (2017). Trump Discovers Article 5 After Disastrous NATO Visit. Diakses 14 Maret 2018, dari <http://foreignpolicy.com/2017/06/09/trump-discovers-article-5-after-disastrous-nato-visit-brussels-visit-transatlantic-relationship-europe/>.
- Hook, G. D., Gilson, J., Hughes, C. W., & Dobson, H. (2005). *Japan's International Relations: Politics, Economy, and Security*. New York: Routledge.
- Jones, D. M. & Khoo, N. (2017). Donald Trump and the New Jacksonians. *Policy*, Vol.33(1), Autumn.
- Lange, N. (2017). Donald Trump, the New President of United States: 10 Questions 10 Answer. *Konrad-Adenauer-Stiftung*. http://www.kas.de/wf/doc/kas_47686-544-2-30.pdf?170120143139, diakses 1 Februari 2018.
- Lind, J. (2017). The Art of the Bluff: The US-Japan Alliance under the Trump Administration. *ISSF*. <https://issforum.org/ISSF/PDF/Policy-Roundtable-1-5AF.pdf>, diakses 29 Januari 2018.
- Meeks, P. (2010). 'Soft' Power, Interest, and Identity: the Future of the US-Japan Alliance. Dalam David Arase dan Tsuneo Akaha (ed), *The US-Japan Alliance: Balancing Soft and Hard Power in East Asia*. New York: Routledge.
- Mochizuki, M. M. & Porter, S. P. (2013). Japan under Abe: toward Moderation or Nationalism? *The Washington Quarterly*, Vol.36(4), Fall.
- Moon, K. H. S. (2008). Challenging US Military Hagemony: 'Anti-Americanism' and Democracy in East Asia. Dalam G. John Ikenberry dan Chung-in Moon (ed), *The United States and Northeast Asia*. Plymouth: Rowman and Littlefield Publisher, Inc.
- Morris-Suzuki, T. (2013). The Rebranding Abe Nationalism: Global Perspective on Japan. *The Asia-Pacific Journal*, Vol. 11(1).
- NBC News. (2016b). Trump's Military Budget Proposal is Far Above Cap Set by Obama and Congress. Diakses 10 Januari 2018, dari <https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/16/trump-military-budget-proposal-congress-obama-spending-cap>.
- _____. (2017a). Trump on North Korea's Kim Jong Un: 'He's Pretty Smart Cookie'. Diakses 28 Desember 2017, dari <https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-north-korea-s-kim-jong-un-he-s-pretty-n753006>.
- _____. (2017b). After Trump's Visit to Japan US Ambassador Enters Fray over Okinawa Base. Diakses 10 Maret 2018, dari https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/after-trumps-visit-to-japan-us-ambassador-enters-fray-over-okinawa-base/2017/11/13/6a05b8c8-c871-11e7-b244-2d22ac912500_story.html?noredirect=on&utm_term=.ab835113d86e.
- _____. (2017b). Trump Wanted Tenfold Increase in Nuclear Arsenal, Suprising Military. Diakses 4 10 Maret 2018, dari <https://www.nbcnews.com/news/all/trump-wanted-dramatic-increase-nuclear-arsenal-meeting-military-leaders-n809701>.
- Office of Management and Budget. (2017). America First A Budget Blueprint to Make America Great Again. Dari https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/11/2018_blueprint.pdf.
- Ohtomo, T. (2012). Understanding U.S Overseas Military Presence after World War II. *Journal of International and Advanced Japanese Studies*, Vol.4, March.
- _____. (2014). U.S Military Bases and Forces Realignments in Japan and Germany. *Journal of International and Advance Japanese*

- Studies*, Vol. 6, January.
- Ota, F. (2006). *The US-Japan Alliance in the 21st Century: A View of the History and Rationale for Its Survival*. UK: Global Oriental, Ltd.
- Sa, H. (2017). The Trump Doctrine Thus Far: Neither Rhyme nor Reason. *RSIS Commentary*. <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/01/CO17001.pdf> diakses pada 10 Maret 2018.
- Shinoda, T. (2011). Cost and Benefits of the U.S.-Japan Alliance from the Japanese Perspective. Dalam Takashi Inoguchi, G. John Ikenberry, dan Yoichiro Sato (ed), *The U.S.-Japan Security Alliance Regional Multilateralism*. New York: Palgrave Macmillan.
- Synder, G. H. (1990). Alliance Theory: A Neorealist First Cut. *Journal of International Affairs*, Vol. 1, March.
- Tanaka, A. & Takadoro, M. (2017). The 1980s: the Decade of Neoliberalism. Dalam Makoto Iokibe (ed), *The History of US-Japan Relations from Perry to Present*. Terjemahan Bahasa Inggris Tosh Minohara. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Tanaka, H. (2016). Trump's Rethoric and the Future of the US-Japan Alliance. East Asia Insight toward Community Building. *Japan Center for International Exchange*. Dari <http://www.jcie.or.jp/insights/11-2.pdf>.
- The Diplomat. (2018). Still No US Ambassador in South Korea. Dari <https://thediplomat.com/2018/02/still-no-us-ambassador-in-south-korea/>.
- The Guardian. (2016a). Thousand protest at US bases on Okinawa after Japanese woman's murder. Diakses 6 Januari 2018, dari (<https://www.theguardian.com/world/2016/jun/19/thousands-protest-at-us-bases-on-okinawa-after-japanese-womans>).
- The New York Times. (2017). Senate Passes \$700 Billion Pentagon Bill, More Money than Trump Sought. Diakses 10 Januari 2018, dari (<https://www.nytimes.com/2017/09/18/us/politics/senate-pentagon-spending-bill.html>).
- The Washington Post. (2017a). North Korea's Latest Missile Launch Appears to Put U.S Capital in Range. Diakses 12 Mei 2018, dari https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-fires-missile-for-the-first-time-in-more-than-two-months/2017/11/28/Oc136952-d46c-11e7-9461-ba77d604373d_story.html?utm_term=.f0ba42269b56.
- Time. (2016). Thousands in Okinawa demands US Military leave Japan after Killing. Diakses 6 Januari 2018, dari <http://time.com/4374184/okinawa-protest-us-military/>.
- Vox. (2015). Why does the US have 800 Military Bases around the World? Diakses 6 Januari 2018, dari <https://www.vox.com/2015/5/18/8600659/military-bases-united-states>.
- Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*, Vol.9(4).
- Yang, Y. (2014). The Adjustment of Japan-US Alliance and the Strategic Options for Chinese Foreign Policy. *Canadian Social Science*, Vol. 10(1).
- Yuliantoro, N. R., Prabandari, A., & Agussalim, D. (2017). Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 5(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/hi.5297>